

1-1 NOV 2003

PAMM...
48



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

**POLA AKTUALISASI WANITA DALAM PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN WISATA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN
STATUS DESA BAHA MENJADI DESA WISATA,
DITINJAU DARI PRESPEKTIF GENDER**

Oleh:

DIAN YULIE R., S.Sos.
SRI ENDAH KINASIH, S.Sos.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 7

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

WOMEN - SOCIAL CONDITIONS

KKB

KK-2B

305.A

Dia

P



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

**POLA AKTUALISASI WANITA DALAM PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN WISATA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN
STATUS DESA BAHU MENJADI DESA WISATA,
DITINJAU DARI PRESPEKTIF GENDER**

Oleh:

DIAN YULIE R., S.Sos.
SRI ENDAH KINASHI, S.Sos.

20/10/02



3000118033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 7

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002



POLEK KULTURALISASI WANITA DALAM PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA BANGUNREJO
KABUPATEN SURABAYA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KAJIAN WANITA

3000118033141

1. a. Judul : 'Aktualisasi Wanita'
Pola Aktualisasi Wanita Dalam Proses Pengambilan Keputusan Wisata Terkait Dengan Perubahan Status Desa Baha Menjadi Desa Wisata, Ditinjau Dari Perspektif Gender.
- a. Bidang Ilmu : Sosial/Pariwisata
c. Kategori penelitian : Pengembangan Sosial Pariwisata
2. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dian Yulie R, S.Sos
b. NIP : 132 230 966
c. Pangkat/Gol : Penata Muda/III A
d. Jabatan sekarang : Asisten Ahli
e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
f. Jurusan : Sosiologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 orang
a. Nama Anggota Peneliti : Sri Endah Nurhidayati, S.Sos
4. Lokasi : Desa Baha Kecamatan mengwi kabupaten Badung
5. Kerjasama dengan Institusi : --
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 6 juta
a. Sumber dari Depdikbud : Rp. 6 juta
b. Sumber lain : --

Surabaya, 30 September 2002

Mengetahui
Kepala Pusat penelitian/Studi Wanita
Universitas Airlangga

Dra. Emy Susanti, MA
NIP. 131 406 097

Ketua Peneliti

Dian Yulie R, S.Sos
NIP. 132 230 966

Disetujui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS
NIP. 130 701 125



RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: "Aktualisasi Wanita" Pola Aktualisasi Wanita Dalam Proses Pengambilan Keputusan Wisata Terkait Dengan Perubahan Status Desa Baha Menjadi desa Wisata, Ditinjau dari Perspektif Gender.
Ketua Peneliti	: Dian Yulie R, S.Sos
Anggota Peneliti	: Sri Endah Nurhidayati, S.Sos
Fakultas/Puslit	: Pusat penelitian/Studi Wanita Unair
Sumber Biaya	: DIP No.003/LIT/BPPK-SDM/IV/2002 Ditjen Dikti Depdiknas.

Industri pariwisata masih diharapkan sebagai sektor penghasil devisa. Salah satu obyek wisata andalan Indoensia adalah Bali, yang memiliki budaya yang asli, pantai eksotis, keadaan alam yang indah, serta masyarakat yang ramah dan siap menyambut kunjungan wisatawan. Tradisi masyarakat, budaya, aktivitas agama, peninggalan kuno, pura, tari-tarian tradisional, dan kehidupan masyarakat merupakan aspek yang ditonjolkan sebagai atraksi wisata, dan dikemas dalam desa wisata. Salah satu desa wisata yang potensial adalah Desa Baha Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud mendeskripsikan aktualisasi wanita dalam pengambilan keputusan wisata wisata terkait dengan adanya perubahan status desa Baha menjadi Desa Wisata. Selain itu juga ingin mengetahui dampak perubahan status tersebut terhadap perempuan, serta perubahan pola aktualisasi ditinjau dari perspektif gender.

Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan penggunaan bahan pustaka.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita di Desa Baha mempunyai peran aktif dan pasive dalam proses pengambilan keputusan di desa. Perubahan status desa menjadi Desa Wisata membawa dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi wanita, tidak bagi laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan hubungan gender antara peran laki-laki dan perempuan.

SUMMARY

Title of Research	: "Women actualization" Pattern of women Actualization in Tourism Decision Making Process Tie with State of change Baha Village to Tourism Village, Looked by Gender Perspective.
Head	: Dian Yulie R, S.Sos
Member	: Sri Endah Nurhidayati, S.Sos
Faculty/ Research Center	: Reserach Center/ Women Studi Airlangga University
Fund	: DIP No.003/ LIT/ BPPK-SDM/ IV/ 2002 Ditjen Dikti Depdiknas.

Tourism industry still hopes as devisa's give in Indonesia. A part of potential tourism object is Bali, that have original culture, exotic beach, good view, a kind of people and welcome to tourist there. The society tradition, culture, religion activity, heritage, religion temple, traditionally dance, the way of live, are potential aspect as tourist attraction. That is called by village tourist, like as Baha Village in Mengwi's Sub-District, Badung District, province of Bali.

The research is intended to describe women's actualization in develop tourism decision making tie with state of change Baha Village to Tourism Village. It is also intended to know state of change impact to women, and pattern actualization change in gender perspective.

The research used a method of descriptive qualitative. Technique of collecting data are observation, interview, and used library material.

It is found from the research that Baha village's women have active and passive participate on diction making process. The state of Baha village's change give psychologist, social, and economical impact for women than men. That condition seems unequal fact as position and role men and women.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan laporan yang mengambil judul Aktualisasi Wanita, Pola Aktualisasi Wanita Dalam Proses Pengambilan Keputusan Wisata Terkait Dengan Perubahan Status Desa Baha Menjadi desa Wisata, Ditinjau dari Perspektif Gender, akhirnya selesai. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang membahas persoalan pariwisata dan gender secara bersama-sama.

Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang didanai oleh DIP No.003/LIT/BPPK-SDM/IV/2002 Ditjen Dikti Depdiknas, sebagai bagian dari program peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Untuk itu tim peneliti mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengkaji permasalahan yang cukup menarik ini.

Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada :

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, yang telah memberi kepercayaan untuk melakukan penelitian ini.
2. Ketua PP/SW Unair beserta staff, yang telah memberi bantuan dan motivasi selama penelitian berlangsung.
3. Segenap Narasumber yang telah membantu jalannya penelitian
4. Rekan-rekan di Prodi Pariwisata yang banyak membantu pelaksanaan administrasi penelitian
5. Arga dan Re yang sudah membantu dalam proses collecting data
6. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan namanya satu per satu disini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan ilmu dari tim peneliti, penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan tulisan. Akhirnya, semoga apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat untuk semua. Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama dan bantuannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, Nopember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN PENELITIAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan Penelitian	20
3.2. Manfaat Penelitian	20
BAB IV METODE PENELITIAN	21
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Gambaran Umum Desa Baha	26
5.2. Potensi Wisata Desa Baha	32
5.3. Aktualisasi Wanita Dalam Pengambilan Keputusan Wisata	36
5.4. Dampak Perubahan Status Desa Baha Menjadi Desa Wisata terhadap wanita	40
5.5. Perubahan Aktualisasi Wanita Dalam Perspektif Gender	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	46
6.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pariwisata saat ini telah berkembang menjadi industri yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara. Pariwisata berkembang sangat pesat di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini berdampak positif pada keberadaan pariwisata yang mampu berperan sebagai kontributor utama dari *Gross National Product* dari sebuah negara.

Di negara sedang berkembang, pariwisata memberikan kontribusi sebesar 1,5% dari *Gross National Product* dunia secara keseluruhan. Sedangkan di Indonesia sendiri, devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata mencapai US\$ 4.710,22 juta. Angka tersebut terjadi tahun 1999 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 4.727.520 orang. Hal ini tentu saja sangat membantu menambah devisa kita yang sempat terpuruk hingga menunjukkan titik negatif, yakni -18,61 % ke arah yang lebih baik, yaitu 8,75% (Pusat Sistem Informasi Deparsenibud).

Meskipun saat ini pariwisata di Indonesia belum pulih kondisinya, namun Indonesia masih mengharapkan sektor ini sebagai pendulang devisa terbesar di Indonesia pada tahun 2009 nanti (Jawa Pos, 1 Juli 1999: 16).

Upaya untuk merealisasi tercantum jelas dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1999 mengenai GBHN Bab IV yang berisi rumusan sebagai berikut :

“Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata yang menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat, melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan Nasional”

Ada beberapa alasan mengapa sektor pariwisata dijadikan sektor andalan pencetak devisa. **Pertama**, adanya fakta makin berkurangnya sumber daya alam (migas, tambang, dsb) sehingga memaksa pemerintah mencari alternatif di luar sektor migas. **Kedua**, di era globalisasi kita tidak mungkin menghindari terjadinya revolusi 3 T



(Three T Revolution) yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Travel, yang ikut mendorong berkembangnya industri tourism. Ketiga, adanya dampak positif sektor pariwisata, khususnya pada penyerapan tenaga kerja.

Berbicara mengenai pariwisata di Indonesia, maka tidak akan lepas dengan Bali. Pada saat nama Bali disebut, maka yang terlintas dalam pikiran adalah suatu bentuk pulau yang sangat indah, sehingga mendapat julukan sebagai pulau Dewata. Pulau Bali sempat membuat iri pulau-pulau yang lain karena kaya akan potensi wisata. Selain itu keberadaan pulau Bali itu sendiri pada kenyataannya mempunyai nama yang lebih terkenal daripada nama Indonesia sendiri. Hal ini memang sangat ironis karena Indonesia selaku pemilik pulau Bali ketinggalan jauh dalam masalah kepopuleran sehingga banyak wisatawan yang bertanya Indonesia itu bagian mana dari Bali. Di Bali sendiri, pariwisata sudah menyokong sebesar 53% dari ekonomi Bali, dimana pertanian yang dulunya menjadi andalan utama masyarakat Bali hanya memberikan sumbangsih sebanyak 30%.

Bali merupakan pulau yang sangat menarik perhatian para wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik Jumlah kedatangan wisatawan di Bali bisa dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wisatawan Yang Datang Ke Bali Tahun 2000-2001

Bulan	Tahun 2000	Tahun 2001
Januari	92.604	108.897
Februari	104.083	99.040
Maret	110.582	115.997
April	109.634	117.040
Mei	103.939	111.115
Juni	122.325	128.792
Juli	142.946	138.150
Agustus	144.324	145.290
September	140.008	133.667
Oktober	128.932	96.527
November	110.345	72.806
Desember	102.290	89.443
TOTAL	1.412.839	1.856.779

Sumber: Bali Immigration Office (2002)

Tabel 1.1. memperlihatkan perkembangan kunjungan wisata ke Bali yang mengalami peningkatan dari angka 1.412.839 orang pada tahun 2000 menjadi 1.856.779 orang pada tahun 2001. Angka ini menunjukkan perkembangan yang meyakinkan Bali sebagai pusat Pariwisata di Indonesia. Tabel tersebut juga memperlihatkan pada bulan Juli, Agustus, dan September setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kunjungan dibanding bulan-bulan lainnya.

Wisatawan yang datang ke Bali yang tertinggi berasal dari Australia, berturut-turut disusul wisatawan asal Jepang, serta negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dan Amerika. Jumlah kunjungan beberapa negara Eropa pun menunjukkan peningkatan yang cukup mengesankan, beberapa negara Eropa yang dimaksud adalah Perancis, Inggris, Jerman, dan Swedia. Sehingga tidak salah lagi jika pariwisata di Bali berperan penting sebagai sumber pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perkembangan pariwisata di Bali dapat dikatakan lebih maju apabila dibandingkan dengan perkembangan pariwisata di propinsi lain. Hal ini disebabkan budayanya yang masih asli dan eksotis, keadaan alamnya yang indah, masyarakatnya yang ramah dan siap menyambut kunjungan wisatawan. Di samping itu, pengemasan paket-paket wisata dan pemasaran paket-paket wisata di Bali yang lebih profesional, rapi dan teratur, serta pengembangan calon daerah tujuan wisata sangat serempak dan merata juga merupakan faktor pendorong banyaknya wisatawan yang datang ke Bali. Tingginya rating perlawatan wisatawan dari berbagai negara selaras dengan pertumbuhan industri kepariwisataan di Indonesia pada umumnya dan pulau Bali pada khususnya.

Faktor lain yang menarik dari Bali adalah adanya masyarakat Bali yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang didasarkan pada ajaran agama Hindu, sehingga di pulau ini banyak dijumpai peninggalan-peninggalan kuno, pura-pura dan tempat-tempat asri lainnya. Selain itu pula Bali juga terkenal akan festival-festival, upacara-upacara ritual, musik tradisional, dan tarian-tarian.

Sementara itu di desa-desa di Bali, kesan magis dan religinya memang terasa

sangat kental. Ini disebabkan antara lain oleh adanya pura dan tempat-tempat suci lainnya. Kehidupan tradisional di desa, seperti menyabit rumput, menghela sapi, menghalau itik, suara gamelan, dan orang berbusana adat merupakan pemandangan yang harmonis. Apalagi bila ada piodalan, kemarakan suasana didukung oleh keramahan dan bersahabatnya masyarakat desa, membuat fenomena yang demikian semakin mengasyikkan.

Ketradisional inilah yang ditawarkan kepada wisatawan melalui paket desa wisata yang kemudian terkenal dengan sebutan *wisata budaya (culture tourism)* sebagai salah satu bentuk wisata alternatif.

Kabupaten Badung, sebagai bagian dari kepariwisataan Bali secara umum, memberi alternatif pada wisatawan karena kekhasan produk yang ditawarkan khususnya berkaitan dengan budaya dan adat masyarakat Bali. Hal ini ikut merangsang pertumbuhan sarana dan prasarana wisata yang ada di Kabupaten Badung, diantaranya adalah tumbuhnya industri akomodasi. Pertumbuhan usaha akomodasi di Kabupaten Badung dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.
Perkembangan Usaha Akomodasi
Di kabupaten Badung tahun 1988-2002

Tahun	Hotel Berbintang		Hotel Malati		Pondok Wisata		Jlh
	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar	Pond	Kamar	
1998	69	12.967	224	5.837	97	450	19.254
1999	73	13.757	232	6.037	101	470	20.264
2000	75	13.883	251	6.309	102	475	20.667
2001	76	13.904	271	6.797	99	476	21.177
2002	81	14.260	275	6.925	99	476	21.661

Sumber: Subdin Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2002

Tabel diatas memperlihatkan usaha akomodasi di Badung mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Untuk hotel berbintang terdapat perkembangan

jumlah dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2002 terdapat 81 buah hotel berbintang di Kabupaten Badung. Jumlah hotel berbintang tersebut diikuti pula dengan perkembangan jumlah kamar yang ditawarkan bagi wisatawan. Sejak tahun 1998 jumlah kamar hotel berbintang di Badung terus meningkat hingga mencapai jumlah 14.260 pada tahun 2002.

Kondisi yang sama juga terjadi pada usaha hotel melati. Baik kuantitas hotel maupun jumlah kamar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 di kabupaten Badung terdapat 275 buah hotel melati yang menyediakan kamar sebanyak 6.925 buah.

Khusus untuk usaha akomodasi berupa pondok wisata, terdapat pertumbuhan yang berbeda. Pada tahun 1998 terdapat 97 buah pondok wisata yang menyediakan kamar sebanyak 450 buah. Pada tahun 1999 dan 2000 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 101 pondok wisata pada tahun 1999 dan 102 pada tahun 2000. Tahun berikutnya jumlah pondok wisata mengalami penurunan sampai tinggal 99 buah saja dengan daya tampung mencapai 476 kamar.

Dari Tabel dapat disimpulkan bahwa pada hingga tahun 2002 Kabupaten Badung mampu menampung wisatawan sebanyak 21.661 kamar di berbagai tipe akomodasi.

Selain perkembangan usaha akomodasi, perkembangan industri pariwisata di kabupaten Badung juga berpengaruh pada tumbuhnya usaha jasa boga sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Perkembangan Usaha Jasa Boga
di Kabupaten Badung 1998-2002

Tahun	Restoran	Rm. Makan	Bar
1998	22	249	158
1999	38	335	179
2000	43	377	206
2001	61	362	246
2002	63	362	246

Sumber: Subdin Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung tahun 2002

Desa Baha yang terletak di kecamatan Mengwi merupakan salah satu obyek wisata yang dikenal karena statusnya sebagai desa wisata. Nilai ketradisional dan kandungan sejarah yang cukup tinggi merupakan daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki desa lainnya di Kecamatan mengwi.

Sehubungan dengan perubahan status dan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Desa Baha maka terdapat suatu pertanyaan kritis yang muncul yakni mengenai aktualisasi wanita dalam proses pengambilan keputusan wisata di desa tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan Desa Baha menjadi desa wisata adalah melalui perencanaan yang berperspektif gender, yaitu perencanaan pembangunan pariwisata yang mempertimbangkan dan mengakomodir kepentingan laki-laki dan wanita secara seimbang. Kendalanya, masih banyak penentu kebijakan atau perencana pembangunan pariwisata yang kurang memiliki wawasan gender, sehingga pengambilan keputusan wisata yang dihasilkan kurang bisa mengakomodir kesetaraan kepentingan laki-laki dan wanita, meskipun dampak perubahan status tersebut secara tidak langsung akan dirasakan laki-laki dan wanita sebagai penghuni desa Baha.

1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aktualisasi wanita dalam pengambilan keputusan wisata dengan adanya perubahan status desa Baha menjadi desa wisata ?
2. Bagaimanakah dampak perubahan status status desa Baha menjadi desa wisata terhadap wanita ?
3. Apakah perubahan pola aktualisasi wanita tersebut cukup adil ditinjau dari perspektif gender ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara tentang pembangunan kapariwisata tidak lepas dari pengertian pembangunan itu sendiri. Pembangunan didefinisikan sebagai perubahan yang terencana dari suatu masyarakat/bangsa. Proses pembangunan mengandung unsur-unsur yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Perencanaan pembangunan merupakan alat untuk mencapai tujuan perubahan masyarakat secara lebih baik.

Saat ini paling tidak ada dua perkembangan menarik yang berkaitan dengan persoalan pembangunan di Indonesia. *Pertama*, mulai dimunculkannya paradigma pembangunan yang baru sebagai ganti paradigma pembangunan lama yang dianggap hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. *Kedua*, mulai dipandanginya suatu pendekatan baru dalam memposisikan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian rakyat memiliki posisi yang sama pentingnya dengan modal, tanah dan teknologi. Oleh karena itu dalam pembangunan berpendekatan baru, manusia diperlakukan sebagai entitas yang harus memformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atas penyelenggaraan aktivitas kehidupan mereka sendiri (Yustika, 2000: 235).

Menurut Dudley Seers (dalam Yustika, 2000:236) menyatakan apabila dalam sebuah bangsa terdapat salah satu atau semua dari persoalan berikut kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, maka pasti ada yang salah dalam proses pembangunan tersebut.

Proses pembangunan di Indonesia selama ini menghasilkan ketiga permasalahan tersebut, seperti dipaparkan dalam Bab II GBHN tahun 1999-2004. Penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah terlalu besar, menyebabkan

kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif dan terjalinya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku, antar golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat.

GBHN juga mengakui status dan peranan wanita dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin dari sedikitnya jumlah wanita yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, badan legislatif, yudikatif, dan dalam masyarakat.

Oleh karena itu konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional. Model pembangunan seperti ini bisa disamakan dengan konsep pembangunan yang memihak rakyat, dimana terdapat penekanan pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Pembangunan berdimensi kerakyatan mengandung konsekuensi dua hal (Yustika, 2000:238):

1. Partisipasi rakyat merupakan unsur mutlak dalam pembangunan. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator, yaitu menciptakan keadaan yang mendorong inisiatif rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.
2. Apa yang dikehendaki rakyat merupakan pilihan terbaik bagi negaranya, baik yang menyangkut tujuan maupun caranya mencapai tujuan. Secara keseluruhan pembangunan menghendaki rakyat benar-benar diposisikan sangat tinggi dalam proses pembangunan yang berjalan (people centered development)

Paling tidak ada 3 alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyeknya akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek

tersebut. *Ketiga*, karena partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Yustika, 2000:251)

Konsekuensi dari semangat pembangunan yang memihak rakyat adalah tersedianya dukungan kebijakan dari pengambil kebijakan (pemerintah) yang sesuai dengan visi perubahan. Dukungan pemerintah juga harus menyentuh upaya penghindaran penciptaan kebijakan-kebijakan diskriminatif, termasuk terhadap wanita. Wanita sebagai salah satu komponen dari masyarakat juga berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Salah satu bentuk sektor pembangunan yang dewasa ini sedang digalakkan pemerintah adalah pembangunan pariwisata. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan obyek wisata yang menarik dan inovatif untuk dikunjungi wisatawan. Salah satunya melalui pengembangan konsep Desa Wisata sebagai daerah tujuan wisata (DTW).

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa. (Dinas Pariwisata Jatim, 1996:6-7)

Dalam pengembangan desa wisata, landasan pembangunan yang digunakan mengacu pada :

- Pengembangan produk yang bernuansa pedesaan.
- Mengembangkan potensi nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal pedesaan, dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai subyek pembangunan.
- Mengembangkan pariwisata tanpa merusak kebudayaan masyarakat lokal.
- Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan usaha pengembangan pariwisata.
- Meningkatkan 'multipler effects' (keuntungan ganda) dari pariwisata
- Menggeser kebutuhan wisatawan bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi untuk mendapatkan pengalaman.

Meskipun konsep pengembangan desa wisata memiliki dimensi yang menguntungkan bagi masyarakat setempat, namun jika tidak dimulai dari perencanaan yang baik justru akan menghasilkan dampak yang merugikan masyarakat setempat.

Hasil penelitian yang dilakukan De Kadt (1979:42-44) di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada awalnya memang mengikutsertakan masyarakat setempat. Tetapi kemudian justru memberi lebih banyak peluang kerja kepada orang luar. Di Bali menurut penelitian de Kadt sudah menunjukkan gejala yang demikian. Hal ini nampak dari kenyataan bahwa beberapa posisi jabatan yang membutuhkan tanggungjawab besar seringkali diisi oleh orang-orang dari luar Bali.

Sementara itu MacIntosh dan Gouldner (1998:172) mengemukakan ada 9 dampak pengembangan pariwisata, termasuk desa wisata, bagi masyarakat setempat.

- Timbulnya aktivitas seperti perjudian, pelacuran, dan kebiasaan minum minuman keras yang sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- Adanya "efek demonstratif", yaitu efek yang muncul karena seringnya masyarakat melakukan kontak dan melihat pola hidup wisatawan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat setempat. Misalnya keinginan penduduk setempat untuk memakai barang-barang seperti yang dipakai/dimiliki wisatawan.
- Munculnya persoalan ketegangan rasial.
- Tumbuhnya sikap rendah diri di kalangan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata
- Adanya upaya komersialisasi kesenian untuk konsumsi wisatawan.
- Munculnya standarisasi peran-peran pekerja.
- Hilangnya kebanggaan masyarakat setempat pada kebudayaan
- Adanya perubahan cara hidup yang terlalu cepat
- Adanya kesenjangan sosial.

Dampak pembangunan desa wisata tentu saja tidak hanya dirasakan laki-laki tetapi juga wanita sebagai anggota dari masyarakat desa. Selama ini masih banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan, termasuk dalam pembangunan pariwisata yang lebih banyak merugikan wanita. Hal ini disebabkan karena proses perencanaan yang keliru dalam hal berikut (Rahardjo, 1995:4):

- Gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisional telah dimainkan
- Mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi di sekitar tugas rutin-rumah tangga, di sekitar mengurus anak.
- Merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk wanita modern di masyarakat yang sedang berkembang.
- Dalam manajemen pembangunan, terdapat kesulitan dalam upaya mengkaitkan kebutuhan wanita dalam program yang ada. Hal ini terutama terjadi karena informasi mengenai wanita sendiri sangat terbatas, sering berada di luar jangkauan statistik, sehingga sulit dioperasionalisasikan dalam satuan kegiatan proyek yang nyata.

Kunci utama peminggiran peran wanita dalam pembangunan pariwisata yakni masih berkembangnya tradisi gender dalam masyarakat. Tradisi ini yang secara sosial membenarkan adanya konstruksi peran yang berbeda antara pria dan wanita cenderung menempatkan wanita pada posisi subordinasi dan tereksplorasi. Perubahan sebuah desa menjadi desa wisata cenderung memunculkan pergeseran angkatan kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, termasuk pariwisata di dalamnya. Namun dengan sistem masyarakat yang masih mengembangkan konsep gender dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, bahkan dalam pembangunan nampaknya pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke sektor pariwisata tetap menempatkan wanita dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Bias gender yang muncul dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat berkaitan dengan konsep gender, yaitu pembagian peran serta tanggung jawab baik



laki-laki maupun wanita yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Gender merupakan bentukan masyarakat bukanlah kodrat, atau ketentuan Tuhan. Misalnya keyakinan bahwa laki-laki yaitu perbedaan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan wanita kerap melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun wanita. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih banyak dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1997, 12-23).

1. Gender dan Marginalisasi Wanita

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat yang menimpa kaum laki-laki dan wanita, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Dari segi sumbernya, marginalisasi wanita bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum wanita untuk mendapatkan waris sama sekali.

2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap wanita. Anggapan wanita itu irrasional atau emosional sehingga wanita tidak bisa memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan wanita pada posisi yang tidak penting.

3. Gender dan Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotipe selalu merugikan atau menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis

stereotype itu bersumber pada pandangan gender, misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa wanita lebih pantas berada di sektor domestik dan tidak pantas jika terlibat di sektor publik. Karena itu wanita dianggap tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Di samping itu banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut.

4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk kekerasan gender misalnya: pemerkosaan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana, dan kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh wanita dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh, serta pelecehan seksual.

5. Gender dan Beban Kerja

Banyak kaum wanita yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh wanita sendiri. Terlebih-lebih jika wanita tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda bekerja di sektor domestik dan sektor publik sekaligus, sementara laki-laki hanya dibebani pekerjaan di sektor publik saja. Beban ganda ini tentu saja merugikan wanita karena beban yang terlalu berat menghambat wanita untuk berkembang secara optimal.

Ideologi gender menurut Alice Schlegel (dalam Daulay, 2001:18-19) melahirkan :

1 Nilai Pemingitan (seclusion), yaitu suatu kondisi dimana wanita dibatasi

gerakannya di wilayah tertentu, misalnya di wilayah rumah tangga seperti dapur dan ruang belakang.

- 2 Nilai Pengucilan dari bidang-bidang tertentu (exclusion), dimana wanita mungkin diberi kebebasan gerak, tetapi tetap dibatasi pada bidang-bidang tertentu. Nilai ini menutup kemungkinan bagi wanita untuk masuk di bidang di luar yang ditentukan.
- 3 Nilai feminitas wanita, yang dikatkan dengan gambaran ideal tentang wanita. Misalnya rendah hati, kepasrahan, ketaatan, dan sebagainya yang dianggap memberi gambaran tentang wanita yang ideal dalam masyarakat.

Perbedaan-perbedaan peran, status dan kedudukan antara laki-laki dan wanita menghasilkan apa yang disebut dengan Ketidakadilan/ketimpangan gender yang terjadi hampir di semua ruang lingkup, rumah tangga, RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, bahkan sampai ke tingkat Nasional. Hal itu antara lain bisa dilihat dari keikutsertaan wanita sebagai pengambil keputusan di berbagai ruang lingkup tersebut.

Keputusan merupakan mekanisme keorganisasian/masyarakat yang seharusnya dianggap sebagai suatu cara dan bukannya tujuan. Dengan kata lain keputusan sebenarnya adalah suatu tanggapan keorganisasian/masyarakat terhadap suatu persoalan. Setiap keputusan adalah hasil dari proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh kekuatan yang relatif banyak.

Kualitas keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan merupakan ukuran dari efektivitas seorang pengambil keputusan. Pengambilan keputusan secara umum merupakan konsekuensi dari informasi yang diterima pengambilan keputusan baik lewat struktur organisasi maupun lewat perilaku dari anggota kelompok. Dalam pengambilan keputusan terdapat unsur-unsur pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja bagi para pengambil keputusan untuk memungkinkan mereka secara lebih efektif menganalisis situasi yang rumit yang mengandung banyak macam alternatif dan konsekuensi yang mungkin. walaupun para pengambil

keputusan dalam berbagai macam organisasi mungkin dapat dipisahkan oleh latar belakang, gaya hidup, dan jarak, namun mereka semuanya nantinya harus mengambil keputusan, yakni mereka menghadapi situasi yang menyangkut beberapa alternatif dan menyangkut suatu perbandingan antara alternatif dan evaluasi dari hasilnya..

Ada dua jenis keputusan yang biasanya diambil para pengambil keputusan (Stoner dan Wankel, 1986:211) yaitu:

- 1 Keputusan yang diprogram (*Programmed decision*): keputusan -keputusan rutin, jika sering terjadi pada situasi yang khusus, maka biasanya akan digunakan prosedur-prosedur rutin untuk memecahkannya, sehingga keputusan dapat diprogramkan sejauh keputusan itu berulang-ulang, rutin, dan telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya, yaitu suatu prosedur kerja yang standart.
- 2 Keputusan yang tidak diprogram (*non program decision*): keputusan yang tidak diprogram adalah bila keputusan itu baru dan tidak tersusun (*unstructured*) karena sifatnya yang semacam itu, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk menangani persoalan karena tidak timbul dengan cara yang persis sama dengan sebelumnya atau karena persoalan itu rumit dan luar biasa pentingnya, sehingga persoalan ini memerlukan penanganan khusus

Proses pembuat dan pengambilan keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap pengambil keputusan dituntut memiliki kemampuan, keahlian, tanggungjawab dan ketahanan, sehingga dapat membuat keputusan dengan segala resikonya, baik resiko yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Selain itu banyak pula faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- Faktor budaya, yang mengacu pada sistem nilai, norma, dan pranata, gagasan/ide, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat.
- Kelas Sosial yaitu pembagian di dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.
- Pengaruh pribadi, merupakan faktor yang bersumber pada kepribadian, sistem

nilai yang dianut, dan faktor lain yang bersifat individual.

- Keluarga, sebagai bagian terkecil dalam masyarakat merupakan faktor yang ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.
- Situasi, adanya situasi tertentu menjadi faktor yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.

Sayogyo (dalam Daulay, 2001:15) mengklasifikasikan peran wanita sebagai pengambil keputusan di dalam rumah tangga dan masyarakat dalam empat aspek, yaitu :

- Keputusan di bidang produksi
- Keputusan di bidang pengeluaran kebutuhan pokok
- Keputusan di bidang pembentukan keluarga
- Keputusan di bidang kegiatan sosial.

Dalam hal ini peran wanita dalam pengambilan keputusan di rumah tangga dan masyarakat terkait dengan peran wanita baik di sektor domestik maupun sektor publik.

Secara umum, wanita paling tidak memiliki 3 peran dalam rumah tangga dan masyarakat :

- 1 Peran produktif, yaitu peran yang dikaitkan dengan kegiatan produktif atau kegiatan yang menghasilkan, berkaitan dengan barang dan jasa, baik yang dikonsumsi sendiri maupun dijual lagi. Termasuk peran produktif misalnya mencari ikan di laut, beternak, bertani, bekerja di kantor, sebagai eksekutif, wiraswasta, dsb. Baik laki-laki maupun wanita memiliki peran produktif, tetapi biasanya ada pembagian peran yang berbeda sesuai dengan pembagian kerja gender yang berlaku. Biasanya pekerjaan produktif wanita kurang mendapat pengakuan dari masyarakat dibanding laki-laki. Contohnya, wanita yang bekerja dalam rumah tangga biasanya dianggap hanya mencari 'tambahan' penghasilan dan pekerjaannya dianggap sebagai 'sampingan', meskipun kenyataannya banyak

wanita yang ternyata menjadi pencari nafkah utama/tulang punggung keluarga.

2 Peran Reproduksi yaitu peran yang berkaitan dengan kegiatan di lingkungan domestik. Peran reproduktif dibedakan atas

- Reproduksi biologis yaitu berkaitan dengan proses-proses biologis dan seksual, yang menjamin lahirnya generasi baru manusia. seperti melahirkan, menyusui, dsb.
- Reproduksi sosial yaitu yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemeliharaan dan sosialisasi di rumah. merawat anak, merawat suami, mengatur rumah, memasak, mencuci, menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Selama ini kegiatan reproduktif sosial banyak dikaitkan dengan peran wanita. Meskipun sangat penting sifatnya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, khususnya keluarga namun seringkali pekerjaan reproduktif kurang dihargai, dan dianggap bukan sebagai pekerjaan, karena peran reproduktif pada umumnya dan reproduktif sosial khususnya tidak menghasilkan uang dan tidak pernah dinilai dengan uang, sehingga bukan dianggap pekerjaan. Namun peran reproduktif biasanya menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Contohnya, mengasuh anak, tidak dianggap sebagai pekerjaan namun curah waktu yang diperlukan sangat banyak.

3 Peran Komunitas/sosial yaitu peran yang berkaitan dengan kegiatan sosial atau kegiatan bersama dalam masyarakat. Seperti kegiatan arisan, rapat desa, gotong royong, perayaan hari besar, dsb. Kegiatan sosial diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial/komunitas. Meski tidak dinilai dengan uang, namun sangat penting sifatnya dan banyak menghabiskan waktu. Dalam hal ini berlaku juga peran gender yang menghasilkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan wanita.

Perbedaan peran laki-laki dan wanita khususnya dalam rumah tangga dan masyarakat menurut Agassi (dalam Daulay, 2001:16), terkait erat dengan struktur kekuasaan dalam keluarga, dimana di dalamnya berkembang ideologi patriarkhi. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, ekonomi, agama, sementara wanita kurang memiliki akses terhadap kekuasaan tersebut. Selanjutnya menurut Kate Miller (dalam Daulay, 2001:17) hubungan patriarkal (adanya dominasi laki-laki) tidak hanya terbatas pada arena kekerabatan tetapi juga terjadi pada semua aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, agama dan seksualitas.

Sejalan dengan makin berkembangnya berbagai kajian tentang wanita, maka peranan wanita dalam pengambilan keputusan baik di sektor rumah tangga maupun sektor publik semakin besar. Wanita mulai aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kehidupan intelektual. Namun, wanita seringkali kehilangan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, dalam hal ini pengambilan keputusan wisata. Struktur kebijaksanaan pariwisata adalah cerminan dari pengambilan keputusan pria yang notabene merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan para pemuka masyarakat adat yang kerap diwakili oleh kaum pria. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pada dasarnya wanita merupakan *the second decision maker* dalam banyak proses pembangunan, lebih-lebih pada pembangunan pariwisata yang berkaitan dengan posisinya sebagai penerima *second hand information* (Cahyon),1994:35) . Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita masih tetap ada, dimana terdapat aksioma yang tidak bisa diubah bahwa laki-laki secara sosial superior disebabkan mereka secara alamiah lebih superior.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui aktualisasi wanita dalam pengambilan keputusan wisata dengan adanya perubahan status desa Baha menjadi desa wisata.
- 2 Untuk mengetahui dampak perubahan status desa Baha menjadi desa wisata terhadap wanita.
- 3 Ingin mengetahui apakah perubahan aktualisasi wanita tersebut cukup adil apabila ditinjau dari persepektif gender.

3.2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi penelitian tentang pariwisata yang masih belum terlalu banyak dilakukan, dibandingkan sektor lainnya.
- 2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dan menjadi acuan dasar bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji aspek pariwisata.
- 3 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata berkaitan dengan status perubahan desa menjadi desa wisata agar lebih mempertimbangkan aspek keadilan gender.
- 4 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi mata kuliah yang berkaitan dengan kepariwisataan maupun gender. Sehingga bisa dimanfaatkan baik oleh mahasiswa, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bermaksud menggambarkan/mendeskripsikan secara mendalam permasalahan mengenai perubahan aktualisasi wanita dan dampaknya ketika diintrodusimya aktivitas pariwisata yang menyebabkan terjadinya perubahan status desa Baha menjadi desa wisata.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Demikian juga hasil penelitian akan berisi kutipan wawancara untuk memberi gambaran tentang permasalahan penelitian.

4.2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi ditetapkan di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, karena berbagai alasan:

- Desa Baha merupakan salah satu desa yang ditetapkan statusnya menjadi Desa Wisata, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin melihat aktualisasi wanita dalam perubahan status desa tersebut.
- Jumlah penduduk wanita di Desa Baha lebih besar dari laki-laki (dari jumlah penduduk sebanyak 3.331 orang, 51% adalah wanita). Peneliti mengasumsikan jumlah yang lebih besar akan menjadi faktor yang mempengaruhi aktualisasi wanita dalam pengambilan keputusan wisata.
- Sebagian besar penduduk Desa Baha menganut agama Hindu. Peneliti mengasumsikan agama akan mempengaruhi aktualisasi wanita dalam

pengambilan keputusan wisata.

4.3 Teknik Penentuan Sampel

Teknik pemilihan sampel yang dipilih adalah teknik non random sampling dengan jenis purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi,1989:82) Dengan mempertimbangkan sifat, ciri-ciri, variasi dan relevansi terhadap permasalahan. Sebagai sampel yang terdiri dari :

- Pengurus PKK dan pengurus LKMD, dimana PKK sebagai organisasi wanita formal di pedesaan yang masih berkembang hingga sekarang berkaitan dengan aktualisasi perempuan dalam pengambilan keputusan wisata. Alasan lain karena PKK memiliki akses dalam organisasi sosial tingkat Desa yaitu LKMD.
- Ibu rumah tangga, sebagai anggota/bagian dari masyarakat secara umum, untuk melihat bagaimana aktualisasi anggota masyarakat pada umumnya terhadap pengambilan keputusan wisata.
- Ketua/anggota seka wanita sebagai salah organisasi kesenian di Desa Baha sekaligus satu pelaku wisata dimana para anggota seka ini terlibat langsung sebagai pelaku pertunjukan seni untuk konsumsi wisatawan
- Wanita pengrajin tape, dimana produk mereka juga menjadi bagian penting dari keseluruhan aktifitas kehidupan desa baha baik secara ekonomis maupun budaya.
- Wanita pedangang/pemilik warung, sebagai salah satu penyedia jasa makan minum bagi masyarakat dan wisatawan.

4.4. Teknik Penentuan Informan

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden, penelitian ini juga memanfaatkan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,

2000:90).

Kegunaan lain dari informan adalah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Oleh karena itu informan bisa dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2000:90).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Pimpinan /staf Dinas Pariwisata Bali
- 2 Kepala Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- 3 Tokoh-tokoh informal wanita Desa Baha
- 4 Responden yang dianggap mampu memberikan data yang lebih spesifik dan mendalam.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis. Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Kedua, data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dimanfaatkan peneliti untuk melengkapi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1 Observasi (pengamatan)

Adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Manfaat pengamatan menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2000:125) adalah:

- Didasarkan atas pengalaman langsung.
- Teknik pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang



berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data.

- Meminimalkan 'bias' yang mungkin muncul
- Memungkinkan peneliti mamapu memahami situasi yang rumit.
- Dalam situasi dimana teknik komunikasi tidak dimungkinkan, pengamatan merupakan cara yang penting/bermanfaat.

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas perempuan di Desa Baha, kegiatan wisata, perilaku perempuan dalam kehidupan, dsb.

2 Wawancara

Adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2000:135). Wawancara adalah cara menggali sesuatu yang diteliti dengan segala sesuatu yang tersembunyi dari subyek penelitian.

Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara (*interview guide*).

3 Penggunaan Bahan dokumen

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh dari sumber kepustakaan agar dapat menunjang data yang disusun sehingga akan dapat mengarahkan penelitian pada tujuannya, diantaranya adalah buku-buku, kamus, buletin, majalah, monografi desa, data dari Dinas Pariwisata, dan lain-lain.

4.6. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh selanjutnya dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan sifat deskriptif kualitatif, artinya dari data yang diperoleh

tersebut akan dilakukan pemaparan tentang interpretasi secara teoritis. Data-data yang dianalisis atau dipaparkan sedetil mungkin sehingga diharapkan akan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai (Hadi, 1989;68)

Dalam pemaparan nanti akan lebih banyak berupa kata-kata, berupa kutipan wawancara dari informan. Sebagai pelengkap juga akan dipaparkan data berupa tabel frekuensi sebagai ilustrasi, namun akan dijelaskan dengan diskriptif yaitu berupa uraian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Desa Baha menjadi desa wisata merupakan proses yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan pengelolaan desa, khususnya yang melibatkan wanita sebagai pengambil keputusan. Secara umum akan dipaparkan lebih dulu gambaran Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5.1. GAMBARAN UMUM DESA BAHA

5.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Baha terletak di Kecamatan Mangwi Kabupaten Badung. Terletak 3 km dari ibu kota Kecamatan dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Munduk Moncos Subak Lepud
 Sebelah Timur : Tukad Penet
 Sebelah Selatan : Jalan Munduk Singa, Subak Bulan
 Sebelah Barat : Telabah Denkayu dan Telabah Munduk Pancung

Desa Baha memiliki wilayah seluas 5,13 km persegi yang terbagi dalam 2 Desa Adat, yaitu Desa Adat Baha dan Desa Adat Cengkok. Selain itu, Desa ini juga memiliki 6 dusun yaitu Dusun Busana Kaja, Dusun Busana Kelod, Dusun Pengabetan, Dusun Kedua, Dusun Gegeran, dan Dusun Bedil.

Dilihat dari kondisi fisik, Desa Baha terletak pada wilayah dengan kemiringan mencapai 8-15%. Iklim rata-rata sedang, dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Angin bertiup di wilayah ini dengan kecepatan sedang. Angin yang bertiup dari arah barat laut yang banyak mengandung kadar air (angin barat) dan menimbulkan hujan bertiup pada bulan Oktober sampai April. Sedang yang bertiup pada bulan Mei sampai September dengan kecepatan lemah sampai sedang dan kurang mengandung air (angin timur) mengakibatkan terjadinya musim kemarau.

5.1. 2. Kondisi Demografis

Hingga akhir tahun 2001 tercatat jumlah penduduk Desa Baha mencapai 3.331 orang yang terbagi dalam 874 KK. Secara rinci perkembangan jumlah KK dan anggota keluarga Desa Baha tahun 1997-2001 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.

Jumlah KK dan Penduduk Desa Baha 1997-2001

Dusun	1997		1998		1999		2000		2001	
	KK	Pdd	KK	Pdd	KK	Pdd	KK	Pdd	KK	Pdd
Bedil	138	552	144	563	148	575	152	581	156	589
Gegaran	130	496	121	496	135	499	138	518	138	528
Kedua	177	704	131	712	181	711	179	723	179	722
Pengabetan	104	394	107	413	112	431	111	430	109	429
Busana Kelod	103	402	108	410	109	414	112	435	111	421
Busana Kaja	148	573	156	582	165	599	125	750	134	463
Cangkok	-	-	-	-	-	-	50	181	47	179
JUMLAH	800	3121	827	3176	850	3229	867	3316	874	3331

Sumber: Monografi Desa Baha Tahun 2001

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah KK dan jumlah anggota keluarga di desa Baha cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah KK yang ada, pada tahun 1997 hanya mencapai 800 KK, berangsur-angsur naik menjadi 827 pada tahun 1998, meningkat kembali menjadi 850 KK pada tahun 1999, pada tahun 2000 mencapai 867 KK, dan mencapai 874 KK pada tahun 2001. Demikian pula jumlah penduduk menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1997 tercatat 3.121 orang, tahun 1998 naik menjadi 3.176 orang, angka tersebut berkembang menjadi 3.229 pada tahun 1999, mencapai 3.316 pada tahun 2000, dan pada akhir tahun 2001 tercatat 3.331 jumlah anggota keluarga/jumlah penduduk. Dari data terakhir yang ada, tercatat 51% dari penduduk adalah wanita.

5.1. 3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Baha didominasi oleh sektor pertanian. Pertanian terpenting meliputi padi, palawija, perkebunan, perikanan dan peternakan. Mata pencaharian penduduk yang lain di sektor industri, jasa/perdagangan, dan lain lain. Gambaran secara umum ada pada tabel berikut:

Tabel 5.2.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Baha
Tahun 2000-2001

No	Jenis Mata pencaharian	2000	2001
01	Petani pemilik sawah	266	266
02	Petani pemilikkebun/tegal	361	364
03	Peternak	710	710
04	Petani perikanan	38	38
05	Industri kecil (tape, anyaman, ukiran)	91	92
05	Jasa dan perdagangan	42	63

Sumber: Monografi Desa Baha Tahun 2001

Dari data tersebut nampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani pemilik sebanyak 226 pada tahun 2000 dan 2001. Petani pemilik tegal/kebun jumlahnya lebih banyak yaitu 710 orang. Petani perikanan sebanyak 38 baik pada tahun 2000 maupun tahun 2001. Masyarakat yang berkecimpung di sektor industri kecil sebanyak 91 orang pada tahun 2000 dan bertambah menjadi 92 pada tahun 2001. Sedang masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan sebanyak 42 orang pada tahun 2000 dan 63 pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan mengalami perkembangan yang cukup pesat dibanding sektor ekonomi lainnya.

Kondisi perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian berkaitan erat dengan organisasi tradisional subak yaitu organisasi yang mengatur sistem pengairan di kalangan masyarakat Bali pada umumnya khususnya Desa Baha. Peran Subak bagi masyarakat sangat penting artinya, sehingga di Desa Baha terdapat Pura Subak. Subak yang ada di Desa Baha antara lain Subak Lepud, Subak Ayunan, Subak Bulan, dan Subak Pacung.

Hasil pertanian penting di Desa Baha adalah Padi, palawija, tanaman musiman/buah-buahan, ketela pohon, dan lain lain. Sedang hasil perikanan yang terkenal dari Desa Baha adalah ikan hias dan ikan konsumsi (lele, tombro, nila). Di desa Baha juga memiliki fasilitas pemancingan. Hasil peternakan yang ada di Desa Baha adalah ayam, itik, dan babi.

Desa Baha juga terkenal sebagai penghasil tape, yang merupakan usaha yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain ditunjang bahan baku yang memadai, kebudayaan masa lalu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk ketrampilan membuat tape. Tape yang dihasilkan rasanya manis, segar, legit, dan tahan lama. Selain dipasarkan di pasar-pasar di sekitar Kecamatan mengwi, Sempidi, atau kapal, tape dari desa Baha juga sering dibeli wisatawan yang kebetulan mampir atau melintasi wilayah Desa Baha. Hasil industri kecil lain yang terkenal dari Desa Baha adalah ukiran/patung khas Bali dan anyaman.

5.1.4. Kondisi Sosial Budaya

Sektor kesehatan menjadi salah satu indikator kondisi sosial suatu wilayah. Di Desa Baha, kesehatan juga merupakan aspek yang dianggap vital. Oleh karena itu pengembangan desa juga diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Baha adalah Puskesmas pembantu yang berperan penting dalam menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Baha dan sekitarnya. Untuk menjaga kesehatan Balita, disediakan Posyandu yang sekaligus juga menjadi wadah bagi ibu-ibu yang memiliki anak Balita untuk berbagi pengalaman, masalah dan solusi dalam membesarkan Balita. Selain kegiatan penimbangan, Posyandu juga aktif memberikan penyuluhan, melakukan vaksinasi, dan melaksanakan Pemberian makanan Tambahan (PMT). Dalam keadaan kritis permasalahan kesehatan yang terjadi bisa diatasi dengan adanya bidan dan perawat praktek di sekitar Desa, sehingga di Desa Baha nyaris tidak ada permasalahan kesehatan yang mengalami keterlambatan penanganan.

Di Desa Baha tidak terdapat masyarakat yang berada dalam kategori KS-1 apalagi Pra-KS. Data monografi desa menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tercatat 765 KK

berada dalam kategori KS III dan jumlah KS III plus mencapai 48 KK. Pada umumnya masyarakat Desa Baha memiliki rumah permanen dan memenuhi syarat kesehatan. Hingga tahun 2000 tercatat kategori rumah sehat di desa Baha mencapai 100% yang ditandai dengan kondisi fisik bangunan, rasio luas rumah dan anggota keluarga, serta fasilitas kehidupan sehari-hari. Dari jumlah KK yang ada 66,03 % telah memiliki jamban sehat, 68,63% telah menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih, dan sisanya menggunakan air bersih yang berasal dari sumur atau sumber mata air yang ada di desa yang merupakan tempat yang dilindungi masyarakat.

Selain kesehatan fisik yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan mental. Desa Baha yang mayoritas penduduknya beragama Hindu sangat memegang adat istiadat dan kebudayaan hindu dengan falsafah Trihita Karanan yang mencerminkan keterkaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Sanghyang Widi Wasa), manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan.

Hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dalam kegiatan upacara keagamaan, didukung dengan tersedianya fasilitas beribadah yang memadai seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem, Pura gunung Agung, Pura Batur, Pura Paibon, dan Pura Subak.

Yang menarik dari pelaksanaan upacara keagamaan atau karya di Desa Baha adalah selalau ditampilkannya Peed atau berjejeranya para ibu dan remaja putri yang sedang membawa sesajen/banten di sepanjang jalan menuju Pura Khayangan Tiga. Kegiatan semacam ini paling tidak bisa dilihat setiap sebulan sekali dan merupakan kegiatan rutin masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan kesenian, di Desa Baha terdapat kelompok/organisasi non formal yang disebut sekaa, yang biasanya berbasis kesenian seperti tarian-tarian tradisional Bali, musik tradisional, drama tradisional/sendratari, keagamaan, dsb. Umumnya kegiatan sekaa merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Hampir semua anggota masyarakat khususnya remaja dan desa bergabung dalam sekaa-sekaa yang diminatinya, seperti sekaa tabuh (sekaa gong, sekaa angklung, sekaa gender, sekaa batel), kecak (aki-laki dan wanita), wayang wong, tari barong, sendratari, legong, dan lain lain. Dengan demikian kesenian tradisional di Desa Baha terjamin kelestarian dan kontinuitasnya. Berkaitan dengan

Dikembangkannya Desa Baha sebagai desa wisata, di Dusun Busana Kaja digelar pertunjukan tari legong untuk turis pada siang hari.

Hubungan dengan sesama manusia merupakan aspek budaya yang sangat dipertahankan di Desa Baha. Kebiasaan hidup saling membantu dianggap bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. Masyarakat baik pria, wanita, remaja, anak-anak tidak pernah berdiam diri di rumah, semuanya terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan dan kesenian di sekaa, maupun di organisasi formal lainnya, seperti organisasi Karang Taruna, LKMD, PKK, dan lain lain.

Hubungan dengan lingkungan tercermin dari masih diberlakukannya awig-awig (peraturan desa/adat) yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah yang dilindungi, seperti hutan, jurang, sungai, sumber air/pancoran, tanaman, dan lain lain. Penggunaan lahan pertanian sawah juga diatur sedemikian rupa dengan sistem tera siring, agar perputaran air efektif dan menjangkau ke seluruh areal pertanian. Di Desa Baha tidak ada air yang terbuang percuma. Genangan air digunakan untuk budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Di tempat yang terlindung tersebut setiap hari diberikan sesajen berupa canangan (semacam besek kecil dari janur yang berisi bunga-bunga), dan diganti terus setiap hari. Yang bertanggungjawab untuk memberikan adalah masyarakat /sekaa yang rumahnya/wilayahnya berdekatan dengan tempat yang dilindungi. Selain itu pura, persimpangan jalan, warung/toko, sawah, benda-benda berharga juga diberikan sesaji serupa.

5.1.5 Aspek Historis

Nama Desa Baha berasal dari kata Bahe yang berarti bara atau hawa panas dari apa. Dulunya Desa Baha merupakan bagian dari kawasan yang bernama Ayunan yang dikuasai seorang Ksatria bernama Arya Ayunan. Wilayah Ayunan yang makmur rupanya mendorong Kerajaan Mengwi yang dipimpin Raja Cokorde Dimade untuk menaklukkan. Guna menghalangi serangan kerajaan mengwi Arya Ayunan membakar kawasan hutan yang kemudian dinamakan Alas Baheng yang berarti panas yang diakibatkan hutan (alas) yang terbakar. Di sebelah timur Alas Baheng inilah kemudian tumbuh menjadi Desa Baheng dan kemudian dikenal dengan nama Desa Baha(Bahe).

Pada jaman kolonial Desa baha terkenal memiliki satria dan prajurit yang gagah berani dalam melakukan perlawanan pada penjajah. Pada tahun 1942 bertepatan dengan pecahnya perang Asia-Pasifik, tentara Jepang mendirikan basis penyimpanan senjata di Desa Baha. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pejuang untuk merebut persenjataan Jepang. Pada saat peralihan kekuasaan ke tentara NICA senjata milik tentara Jepang konon banyak yang dibuang ke sumur, selanjutnya markas tentara Jepang diambil alih NICA. Saat kemerdekaan RI markas tersebut tidak lagi digunakan. Namun hingga sekarang basis tentara Jepang dan NICA tersebut masih ada namun dalam kondisi kurang terawat. Di samping itu bukti perjuangan tentara desa Baha berupa goa persembunyian/gerilya yang dibangun tentara bersama rakyat dan hingga sekarang masih ada di dekat pemandian umum. Untuk memasuki goa ini harus menyelam untuk menemukan pintu masuk yang berada di bawah permukaan air. Goa ini sekarang dikenal sebagai goa perjuangan.

Setelah kemerdekaan, Desa Baha menata diri dan membangun perekonomian berbasis pertanian. Kawasan hutan lindung yang menyimpan nilai sejarah tetap dipertahankan hingga sekarang. Ketika terjadi pemisahan Badung dengan Denpasar, Desa Baha mendapat perhatian tersendiri. Gagasan untuk menjadikan Desa Baha sebagai Desa Wisata muncul pada saat pemerintahan Bupati Badung Gusti alit Putra. Untuk mendukung gagasannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang obyek wisata yang didalamnya menyebutkan Besa baha sebagai Obyek Wisata dengan Wisata Alam dan Budaya.

5.2. POTENSI WISATA DESA BAHA

Pengembangan kawasan wisata Desa Baha yang terkenal sebagai Desa Perjuangan dipusatkan di 2 desa adat dan 6 Dusun yang ada disana, dengan wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung berupa mata air, sejarah bangsa berupa peninggalan goa perjuangan, dan hutan (alas). Sedang kawasan budidaya berupa lahan untuk pertanian, perindustrian, pariwisata, dan pemukiman. Di desa Baha, yang menjadi kawasan budidaya adalah kawasan utara dan selatan desa. Kawasan utara dengan fungsi persawahan dan pemukiman, sedang kawasan selatan untuk fungsi persawahan. Pada kawasan utara dibagi dalam 3 zone yaitu zone barat,

tengah dan timur. Zone barat terdapat fungsi hutan lindung dan kawasan budidaya. Zone ini juga memiliki sumber mata air yang banyak dengan kualitas cukup baik dan menjadi target pelestarian. Di zone inilah terletak goa perjuangan. Sebagai tempat budidaya perikanan, juga dikembangkan ikan hias dan ikan konsumsi, dengan air yang cukup mendukung, berdampingan dengan persawahan dan pemukiman. Yang termasuk zone ini adalah Dusun Pengabetan, Kedua, Gegeran, dan Bedil. Zone ini juga merupakan jantung karena terdapat pusat pemerintahan desa dinas Desa Baha dan khayangan tiga Desa Adat Baha.

Zone tengah meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya. Termasuk dalam zone ini adalah sempadan sungai, jurang tukad penet, pemukiman penduduk, perkebunan, ladang, dan sawah. Zone ini meliputi Dusun Busaja Kaja dan Busaha Kelod.

Zone timur terdapat fungsi kawasan budidaya dengan kawasan perumahan dan persawahan, terdapat di Desa Adat Cengkok.

Menurut bu Sri, Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, penentuan Desa Baha sebagai Desa wisata didasarkan atas pertimbangan:

1. Secara historis, Desa Baha merupakan basis para pejuang di masa revolusi fisik. Desa ini merupakan tempat berkumpul para pejuang untuk menyusun strategi penyerangan dan perlawanan terhadap penjajah.

“...Nilai historis inilah yang ingin dipertahankan, bahkan dikembangkan kepada masyarakat Desa Baha dan wisatawan. Semangat heroisme ini yang akan menjadi ciri khas Desa Baha yang membedakan dari Desa lainnya di Mengwi, selain muatan budayanya..”

2. Kawasan Desa Baha merupakan jalur strategis untuk jalur wisata Sangeh menuju Taman Ayun, dan sudah ditetapkan Diparda Tk II Badung sebagai jalur segitiga obyek wisata Sangeh-Baha-Taman Ayun dan disiapkan untuk ditawarkan dalam satu paket wisata. Tentang hal ini menurut bu Sri:

“...Kawasan ini sudah disosialisasikan di biro perjalanan di Bali dan luar Bali agar ditawarkan sebagai satu paket. Namun kenyataannya tidak semua biro perjalanan mau mempromosikan Desa Baha sebagai desa wisata...”

3. Desa Baha memiliki daya tarik utama yaitu budaya masyarakat diantaranya kegiatan keagamaan di Desa yang menampilkan peed atau deretan pembawa banten menuju

pura, rumah penduduk dengan penataan menggunakan asta kosala-kosali dengan angkul-angkul (pagar tradisional Bali) yang seragam, masih menggunakan alat tradisional untuk memasak, kesenian tradisional (tarian, drama tradisional, barong), sistem subak yang dipertahankan, serta nilai historis Desa Baha itu sendiri. Tentang daya tarik tersebut menurut bu Sri:

“..Potensi budaya Desa Baha banyak khususnya kehidupan masyarakatnya yang masih tradisional di tengah-tengah masyarakat yang masih tradisional. Pasti menarik bagi wisatawan untuk mengikuti tour ke rumah penduduk, melihat mereka memasak dan bercocok tanam di sawah. Menikmati kesenian, makan makanan tradisional Desa Baha seperti lawar dan tape, serta membawa pulang cinderamata berupa patung, ukiran dan anyaman hasil kerajinan masyarakat..”

Potensi yang ada didukung pula dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan adat setempat. Seperti diungkapkan pak Made, Kepala Desa Baha:

“...Pengembangan desa wisata harus didukung masyarakat karena yang dijual ke desa dengan masyarakatnya. Di Baha masyarakatnya sudah siap, sejak semula masyarakat di sini aktif. Sekaa dan awig-awig desa juga mendukung, asal aspek lingkungan tetap dipertahankan..”

Lain lagi pendapat pak Nengah, salah seorang tokoh informal desa Baha:

“...yang penting desa Baha harus tetap mempertahankan Tri Hita Karana, tidak boleh mengganggu daerah lindung. Bule yang datang ke sini juga harus mematuhi ketetapan desa, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu umat hindu melakukan ibadah. Tidak ada masalah, itu saja..”

Masyarakat juga menanggapi positif pengembangan desa Baha sebagai desa wisata seperti diungkapkan bu Manis:

“..kedatangan wisatawan bisa untuk usaha, saya jualan di warung sudah dua tahun ini. Kadang-kadang ada bule yang kesini, beli minuman, beli permen...”

Bu Wayan, salah seorang pengrajin tape mengungkapkan hal yang senada:

“...kalau banyak turis yang beli tape disini, saya tidak perlu jual di pasar Sempidi. Kalau ada rombongan tour banyak yang jual tape di pinggir jalan. Tapi turis kadang ramai kadang sepi..”

Dari kutipan wawancara di atas, bisa disimpulkan bahwa semua pihak sangat mendukung pengembangan desa Baha sebagai Desa Wisata, karena intinya unsur yang dijadikan obyek wisata adalah desa, lingkungan, budaya, dan serta adat istiadat

masyarakat, yang memang sudah ada disana. Dengan kata lain obyek wisata yang ditampilkan bukan hal baru, dan sudah tersedia.

Potensi yang terdapat di Desa Baha menurut Prof. Mariotti (dalam Yoeti, 1987:160-161) merupakan Tourism resources berupa attractive spontanee yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang /wisatawan mau datang ke tempat tersebut. Hal-hal yang bisa menarik orang untuk datang berkunjung adalah:

- Natural amenities, seperti iklim, bentuk tanah dan pemandangan, serta flora dan fauna.
- Man-made supply yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil ciptaan manusia (monumen sejarah, museum, art gallery, acara tradisional, dan rumah ibadah).
- The way of life yaitu tata cara hidup masyarakat.

Berdasar kategori tersebut, ketiga jenis tourism resources tersebut ada di Desa Baha. Natural amenities berupa daerah persawahan dengan iklim yang sejuk. Man-made supply berupa hasil kerajinan, industri kecil, bangunan berarsitektur khas Bali, bangunan suci, dan kegiatan upacara dan kesenian lokal. Sedang dari aspek the way of live berupa kehidupan tradisional masyarakatnya baik dalam bercocok tanam, memasak, dan lain lain.

Dari aspek syarat Desa Baha sudah memiliki 3 unsur yang ditetapkan Mariotti (dalam Yoeti, 1987:164-166) sebagai Daerah Tujuan Wisata :

- Something to see, dimana DTW harus memiliki obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lain. Di desa Baha banyak potensi obyek wisata yang tersedia.
- Something to do, dimana DTW harus memiliki fasilitas rekreasi yang bisa menahan wisatawan agar tetap tinggal. Desa Baha memiliki hutan untuk hiking, kolam pemancingan untuk olah raga, wilayah yang teratur rapi untuk tour ke desa, dan lain lain.
- Something to buy, dimana DTW harus menyediakan sarana untuk berbelanja khususnya produk souvenir/cinderamata khas. Hasil kerajinan anyaman, ukiran dan tape merupakan cinderamata/oleh-oleh khas Desa Baha.

5.3. AKTUALISASI WANITA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN WISATA

Ditetapkannya desa Baha sebagai Desa Wisata sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, namun gregetnya baru dirasakan sejak tahun awal tahun 1999. Sejak awal merupakan keputusan yang berasal dari luar desa dan merupakan bagian dari Struktur Tata Ruang Kecamatan Mengwi sebagaimana diatur dalam kebijakan dan strategi pengembangan Kecamatan Mengwi 1995-2005, dimana Desa Baha ditetapkan sebagai Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) desa wisata. Selanjutnya Kepala Desa Baha menjelaskan:

“..Sejak diundang dalam rapat SKP dua tahun lalu (ket: saat baru jadi Kades) sudah ada upaya mensosialisasikan ke tingkat Desa dan Dusun melalui LKMD. Disitu desa kemudian mengembangkan strategi pembangunan desa dengan berpegangan pada SKP yang ditetapkan Kecamatan..”

Dari kutipan wawancara tersebut jelas bahwa konsep dasar pengembangan desa wisata berasal dari luar desa dan merupakan keputusan yang diprogram (programmed decision) yang berasal dari pemerintah. Seperti pada umumnya program pembangunan, dalam hal ini keputusan status desa Baha dari Desa biasa menjadi Desa Wisata menjadi bagian dari kebijakan Top Down atau kebijakan yang diturunkan dari pusat (dalam hal ini Kabupaten) ke daerah di bawahnya. Terhadap keputusan semacam ini biasanya daerah (dalam hal ini Kecamatan, dan Desa) tidak bisa menolak.

Keterlibatan wanita dalam keputusan tersebut tidak ada, karena mekanisme pengambilan keputusannya dilakukan di tingkat Kecamatan yang dalam hal ini lebih banyak diwakili bapak-bapak (laki-laki) sementara wanita hanya menjadi seksi konsumsi, sekretaris, dan MC.

Perubahan status sebagai desa wisata membawa konsekuensi ke arah pembangunan desa, seperti diungkapkan pak Putu, ketua LKMD Desa Baha :

“...Karena desa baha dijadikan desa wisata, seluruh pembangunan desa harus mendukung. Desa harus berbenah agar menarik dan pantas dikunjungi turis. Jadi program pembangunan juga tidak jauh dari pengembangan wisata..”

Beberapa program pembangunan yang dihasilkan LKMD diantaranya pengaspalan jalan desa dan penyeragaman angkul-angkul. Tujuan utama pengaspalan desa adalah untuk mempermudah akses alat transportasi ke desa sekaligus menghidupkan perekonomian desa termasuk perdagangan. Sedang penyeragaman angkul-angkul bertujuan untuk memperindah lingkungan desa sehingga turis merasa nyaman berada di desa. Program yang dicanangkan berjalan dengan didukung partisipasi dari masyarakat, seperti diungkap salah seorang warga, pak Yasa:

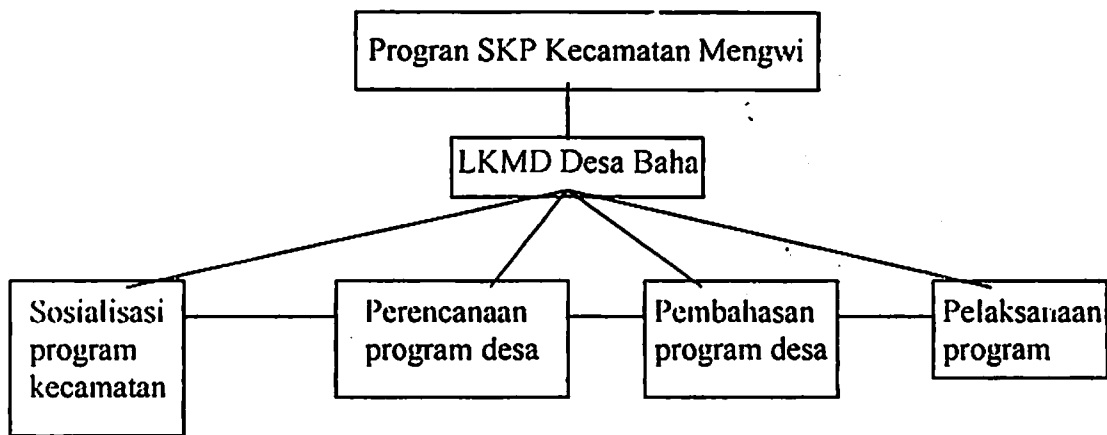
“..Karena sudah menjadi keputusan desa dan adat, kita harus patuh. Tujuannya baik, biar lingkungan jadi bagus, turis mau datang...”

Lain lagi pak Ketut:

“..Saya sebenarnya mendukung, tapi membuat angkul-angkul itu biayanya mahal. Meskipun desa jadi indah kalau menyusahkan masyarakat buat apa. Buktinya sudah bagus turis juga tidak ramai..”

Dengan demikian dukungan dari masyarakat masih mengandung catatan misalnya memperhitungkan kekuatan ekonomi masyarakat serta adat setempat.

Dilihat dari mekanisme pembuatan keputusan di tingkat Desa bisa dilihat pada bagan mekanisme berikut:



Sumber: data primer

Dari mekanisme tersebut, paling tidak ada dua empat tahapan kegiatan yang dilakukan LKMD berkaitan dengan penetapan desa Baha sebagai desa Wisata :

- Tahap sosialisasi, dimana Kepala Desa mensosialisasikan konsep desa wisata kepada masyarakat melalui musyawarah LKMD sebagai lembaga formal di tingkat Desa.
- Tahap Perencanaan program, yang merupakan hasil masukan dari seluruh yang hadir . Program yang amsuk selanjutnya diseleksi berdasar tingkat kepentingannya.
- Tahap pembahasan program, dimana anggota LKMD mulai membahas program berkaitan dengan upaya menunjang status desa wisata .

- Tahap pelaksanaan, dalam hal ini sudah ditentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang sudah disepakati hingga pada tahap pelaksanaannya di lapangan.

Dalam kegiatan sosialisasi seluruh pengurus LKMD yang terdiri dari :

- 1 Kepala Desa
- 2 Pengurus kampung (Kepada Dusun, Ketua RW, RT)
- 3 Pengurus LKMD (termasuk di dalamnya wakil dari PKK sebagai Wakil Ketua II dan seksi pendidikan).
- 4 Tokoh formal dan informal masyarakat (termasuk di dalamnya ketua sekaa, subak, dan tokoh adat Bali).

Seluruh anggota LKMD sebanyak 24 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 3 orang wanita.

Dalam hal menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat desa (LKMD) peran wanita kecil karena dilihat dari prosentase seluruh anggota LKMD jumlah wanita hanya sekitar 14%, dengan demikian suara wanita yang terakomodir dalam rapat-rapat desa juga tidak seimbang antara laki-laki dan wanita.

Hal ini berkaitan erat dengan peran gender yang ada dalam masyarakat, bahwa laki-laki tempatnya di sektor publik, termasuk menghadiri rapat-rapat desa, sedangkan wanita di sektor domestik. Peran ini juga terbawa ketika wanita memasuki sektor publik sebagaimana tercermin dalam petikan wawancara dari anggota LKMD dari sekaa Legong berikut:

“..saya malas kalau rapat-rapat begini, capai. Sehari sudah bekerja di sawah, di rumah. Apalagi kalau rapat malam hari waktunya orang beristirahat. Tapi karena penting saya datang saja. Disini juga diam saja cuma bapak-bapak yang ngomong terserah..”

Lain lagi pendapat Bu Menik, Wakil ketua II dan wakil PKK ini :

“..Penting untuk mengikuti semua keputusan desa, karena PKK siap menjalankan di lapangan termasuk sosialisasi status desa wisata. Siapa tahu ada manfaatnya bagi kaum wanita untuk menambah penghasilan keluarga. Di PKK ada program UP2K bisa diarahkan untuk kegiatan wisata.”

Dari kutipan wawancara tersebut paling tidak ada dua bentuk keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa :

- 1 Keterlibatan aktif, dimana wanita menempatkan diri sebagai pelaku aktif dari pembuat keputusan.
- 2 Keterlibatan pasif, dimana wanita menempatkan diri sebagai bagian luar dari pengambil keputusan.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan pasif wanita dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa :

- Adanya beban kerja ganda wanita baik dalam ranah rumah tangga (mengurus rumah, memasak, mencuci, mengurus anak dan suami, mengurus rumah, dan lain lain), produksi (menyiangi rumput, menanam benih, mengusur hama sawah), sehingga ketika berperan di sektor publik wanita cenderung kurang melihat diri secara penuh, lelah, dan tidak nyaman dengan lingkungan yang didominasi laki-laki. Pada umumnya, lembaga di tingkat desa kurang peka dengan kondisi wanita yang seperti itu. Wanita diasumsikan sama dengan laki-laki yang notabene tidak dibebani dengan berbagai pekerjaan. Jika kemudian hasil keputusannya lebih banyak didominasi laki-laki hal itu dianggap sudah konsekuensinya, seperti diungkapkan salah seorang pengurus LKMD yang juga ketua Sekaa Teruna:
 "...disini ibu-ibu PKK selalu dilibatkan dalam rapat desa. Tapi kalau rapat kadang diam saja kadang mengantuk. Padahal kan diundang untuk diminta pendapatnya. Jadi ya bapak-bapak sendiri yang rapat.."
- Waktu kegiatan biasanya dalam hari, dimana waktu tersebut biasanya digunakan wanita untuk beristirahat dan mempersiapkan kegiatan keesokan harinya.
- Stereotipe tentang kemampuan wanita di sektor publik yang kadang-kadang justru membuat wanita semakin terpinggirkan. Misalnya dianggap tidak bisa ngomong, penakut, tidak punya ide, dan sebagainya. Hal ini nampak dari petikan wawancara berikut:

"...Tapi kalau rapat kadang diam saja kadang mengantuk..."

Hal serupa diungkapkan bu Sari dari Sekaa Legong:

"...Disini juga diam saja cuma bapak-bapak yang ngomong, terserah.."

Ungkapan lain dari pak Koyot, salah seorang Kasun:

“..Sebenarnya wanita di Bali sudah bekerja keras, jadi tidak perlu ikut-ikutan rapat. Kalau rapat diam saja. Ditanya setuju-setuju saja, percuma. Lebih baik bapak-bapak saja yang rapat, kasihan. Soalnya sampai malam acaranya..”

sementara faktor yang mendorong perempuan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa berkaitan dengan faktor berikut:

- Tingkat pendidikan lebih tinggi.

Wanita yang terlihat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa biasanya yang berasal dari tingkat pendidikan tinggi (SMA). Namun bukan berarti mereka yang pendidikannya rendah tidak bisa aktif dalam pengambilan keputusan.

- Kesadaran akan pentingnya peran perempuan

Adanya kesadaran akan pentingnya peran perempuan juga ikut mendorong aktifnya wanita dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa.

- Keterlibatan dalam organisasi formal di tingkat desa

Wanita yang aktif dalam proses pengambilan keputusan umumnya memiliki keterkaitan dengan organisasi formal di tingkat desa seperti PKK. Kegiatan PKK biasanya berkaitan langsung dengan bagaimana peran wanita mengikuti perkembangan isu atau permasalahan di tingkat desa. Jika PKK memiliki program yang selaras dengan program desa dianggap wanita telah berperan dalam pembangunan. Peran dalam pembangunan juga diasumsikan pengurus PKK sebagai berperan dalam ekonomi. Jika perempuan mampu menghasilkan uang bagi keluarga, maka perempuan dianggap berperan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat di desa Baha bahwa wanita yang sudah menikah tidak berhak mewarisi harta keluarganya, sehingga ia harus berusaha keras sendiri untuk memiliki harta yang bisa digunakan untuk keluarganya. Oleh karena itu peran ekonomis perempuan di Desa Baha sangat besar, hampir semua sektor kehidupan perempuan terlibat dalam kegiatan produktif, seperti bekerja di sawah, memelihara ternak, membuat tape, berdagang, dsb.

5. 4. DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA BAHA MENJADI DESA WISATA TERHADAP WANITA

Perubahan status menjadi desa wisata telah merubah pola kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya mereka hidup dengan apa adanya, sebagai obyek wisata mereka akan menerima wisatawan yang masuk ke wilayahnya dengan segala perilaku, budaya, penampilan, dan hal lain yang berbeda dengan masyarakat setempat. Tentu saja hal ini juga berdampak terhadap wanita di Desa Baha.

Ada beberapa dampak yang perubahan status desa Baha menjadi desa wisata terhadap wanita:

- Dampak ekonomis

Dampak ekonomis yang diterima wanita di Desa baha adalah berkembangnya perekonomian yang dikembangkan wanita, diantaranya sektor industri kecil, jasa dan perdagangan. Beberapa usaha baru muncul dengan masuknya wisatawan ke desa, seperti diungkapkan bu Umi, yang berasal dari Jawa Timur ini:

“..Kalau mau sediki susah jualan disini pasti laku, apalagi kalau hari sabtu dan minggu banyak turis yang melihat-lihat sawah, lalu mampirnya ya kesini beli-beli. Lumayan untuk tambahan belanja..”

Hal serupa diungkapkan bu Nengah:

“...Kalau hari biasa saya kerja di sawah, kalau musim turis saya jual tape di sini (tepi jalan). Hasilnya bisa untung sampai Rp. 25.000-30.000 bersih sekali jual ...”

- Dampak psikologis

Selain dampak positif, masuknya wisatawan ke desa telah membawa nilai-nilai baru bagi generasi muda, seperti pola pikir, gaya hidup, pola konsumsi, dan sebagainya. Hal ini sangat mengkhawatirkan wanita sebagai pendidik dan pengasuh anak-anak di lingkungan keluarga. Seperti diungkapkan oleh bu Manis:

“...Anak-anak banyak yang ikut-ikutan pakai cat rambut. Bli (suami) marah-marah karena saya dianggap lalai mengurus anak. Yang besar perempuan mulai kenalan dengan bule, saya tidak mau anak saya sama bule. Nanti Bli tambah marah..”

Masuknya pengaruh wisatawan membuat beban para wanita justru meningkat. Adanya stereotipe kalau wanitalah yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak membuat wanita sering dipersalahkan jika ada anak-anak yang berbuat kesalahan. Laki-laki secara psikologis kurang terpengaruh karena tidak terlibat langsung dalam pengasuhan anak atau

keterlibatannya kecil sekali. Karena itu laki-laki tidak melihat adanya perubahan pada perilaku, tata nilai, dan kebiasaan anak-anak.

Pengaruh gaya hidup dan perilaku hanya dominan pada anak muda baik laki-laki maupun wanita, sedang pengaruhnya pada orang dewasa tidak nampak.

- Dampak sosial

Perubahan status sebagai desa wisata membawa perubahan nilai pada masyarakat, termasuk wanita. Kalau sebelumnya masyarakat melakukan aktifitas keseharian dengan biasa-biasa, ketika kedatangan tamu mereka harus selalu ramah dan tampil lebih rapi saat wisatawan datang untuk melihat-lihat mereka memasak, diajak berfoto bersama, bahkan kadang diajak bercakap-cakap wisatawan. Hal tersebut diungkapkan oleh bu nengah:

“..ibu-ibu disini kalau dulu masak cuma pakai kain (untuk kemben) sekarang pakai baju. Terus sisiran, takut ada tamu sewaktu-waktu, malu khan kalau di foto turis..”

Perubahan penampilan para ibu ketika beraktifitas di dapur justru mengurangi kealimiahannya mereka yang sebenarnya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, khususnya wisman. Karena mereka ingin menyaksikan bagaimana aktifitas para perempuan di dapur tradisional dengan segala keasliannya.

Sini nampaknya wanita di Desa baha mulai kehilangan identitas aslinya karena terpaku pada model sosialisasi yang dilakukan desa bahwa mereka akan ditonton turis jadi harus siap ditonton, mereka merasa bahwa tampil apa adanya akan membuat turis tidak datang kembali ke desa yang artinya akan mengurangi pemasukan. Untuk setiap wisatawan yang datang mereka akan menerima fee dari Biro Perjalanan yang membawa rombongan sebesar Rp. 5.000/Orang.

Gejala lain ada upaya menjadikan wanita desa Baha (baik berkaitan dengan aktifitas di rumah tangga, maupun di luar rumah tangga seperti dalam kesenian) sebagai komoditas atau obyek tontonan wisatawan. Dengan kata lain dalam pembangunan wisatawan yang dikembangkan di desa wisata wanita tetap berperan sebagai obyek saja sementara laki-laki-lah yang mengatur bagaimana mereka harus berperan.

5.5. PERUBAHAN AKTUALISASI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Perubahan aktualisasi(peran) wanita sebelum dan sesudah perubahan status bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3.

Perubahan peran wanita di Desa Baha

Jenis Peran	Sebelum	Sesudah
Reproduktif/domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Melahirkan, menyusui • Mengasuh anak • Mendidik anak • Merawat suami • Memasak • Mencuci • Membersihkan rumah • Mencari kayu bakar • Mengambil air • Menyiapan canangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melahirkan, menyusui • Mengasuh anak • Mendidik anak • Merawat suami • Memasak • Mencuci • Membersihkan rumah • Mencari kayu bakar • Mengambil air • Menyiapan canangan • Menerima wisatawan di rumah
Produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyemai benih • Menanam benih • Menyiangi rumput • Mengusir burung • Memanen • Mengurus ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyemai benih • Menanam benih • Menyiangi rumput • Mengusir burung • Memanen • Mengurus ternak • Menerima wisatawan di sawah • Mengembangkan usaha untuk kepentingan wisatawan
Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti rapat desa • Mengikuti upacara keagamaan • Kegiatan sekaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti rapat desa • Mengikuti upacara keagamaan • Kegiatan sekaa • Tampil dalam pertunjukan untuk konsumsi wisatawan.

Sumber: Data primer.

Tabel 5. 4.

Perubahan peran Laki-laki di Desa Baha

Jenis Peran	Sebelum	Sesudah
Reproduktif/domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari kayu bakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari kayu bakar

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil air 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil air
Produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Mencangkul • Membajak sawah • Membeli makanan ternak • Membeli bibit • Menjual hasil pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencangkul • Membajak sawah • Membeli makanan ternak • Membeli bibit • Menjual hasil pertanian • Menerima wisatawan di sawah
Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti rapat desa • Mengikuti upacara keagamaan • Kegiatan sekaa • Kegiatan subak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti rapat desa • Mengikuti upacara keagamaan • Kegiatan sekaa • Kegiatan Subak • Tampil dalam pertunjukan untuk konsumsi wisatawan. • Mengatur mekanisme pertunjukan

Sumber : Data Primer

Dari dua tabel diatas, terlihat bahwa aktualisasi wanita berkaitan dengan perubahan status membawa pengaruh baik pada laki-laki maupun wanita di Desa Baha, namun dengan model yang berbeda.

Laki-laki yang memang sebelumnya memang posisi penting di sektor publik tetap mendominasi dengan perubahan status, bahkan perubahan yang sangat besar adalah dalam pengaturan atraksi wisata. Laki-lakilah yang mengatur bagaimana perempuan harus tampil sebagai atraksi wisata baik di rumah maupun dalam pertunjukkan.

Sementara perempuan tetap menanggung beban yang lebih besar dari beban yang sebelumnya ditanggung. Perubahan status menjadi desa wisata juga tetap saja menjadikan wanita sebagai obyek pembangunan sedangkan laki-laki tetap sebagai subyek pembangunan. Jika dilihat dari kacamata gender kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan (unequal) posisi dan peran laki-laki dan wanita. Ketidakadilan yang memang sebelumnya sudah ada menjadi semakin tidak adil ketika akses wanita dalam pengambilan keputusan terbatas. Meski jumlahnya lebih banyak wanita di desa Baha

tidak mempunyai suara yang seimbang dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dalam hal menentukan proses pengambilan keputusan wisata di tingkat desa (LKMD) peran wanita kecil karena dilihat dari prosentase seluruh anggota LKMD jumlah wanita hanya sekitar 14%, dengan demikian suara wanita yang terakomodir dalam rapat-rapat desa juga tidak seimbang antara laki-laki dan wanita.

Hal ini berkaitan erat dengan peran gender yang ada dalam masyarakat, bahwa laki-laki tempatnya di sektor publik, termasuk menghadiri rapat-rapat desa, sedangkan wanita di sektor domestik. Peran ini juga terbawa ketika wanita memasuki sektor publik

Ada dua bentuk keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa :

- 1 Keterlibatan aktif, dimana wanita menempatkan diri sebagai pelaku aktif dari pembuat keputusan.
- 2 Keterlibatan pasif, dimana wanita menempatkan diri sebagai bagian luar dari pengambil keputusan.

Ada beberapa dampak yang perubahan status desa Baha menjadi desa wisata terhadap wanita:

- Dampak ekonomis

Dampak ekonomis yang diterima wanita di Desa baha adalah berkembangnya perekonomian yang dikembangkan wanita, diantaranya sektor industri kecil, jasa dan perdagangan.

- Dampak psikologis

Masuknya wisatawan ke desa telah membawa nilai-nilai baru bagi generasi muda, seperti pola pikir, gaya hidup, pola konsumsi, dan sebagainya. Hal ini sangat mengkhawatirkan wanita sebagai pendidik dan pengasuh anak-anak di lingkungan keluarga. Masuknya pengaruh wisatawan membuat beban para wanita justru meningkat. Adanya stereotipe kalau wanitalah yang bertanggungjawab dalam

pengasuhan anak membuat wanita sering dipersalahkan jika ada anak-anak yang berbuat kesalahan. Laki-laki secara psikologis kurang tertengaruh karena tidak terlibat langsung dalam pengasuhan anak atau keterlibatannya kecil sekali. Karena itu laki-laki tidak melihat adanya perubahan pada perilaku, tata nilai, dan kebiasaan anak-anak.

- Dampak sosial

Perubahan status sebagai desa wisata membawa perubahan nilai pada masyarakat, termasuk wanita. Kalau sebelumnya masyarakat melakukan aktifitas keseharian dengan biasa-biasa, ketika kedatangan tamu mereka harus selalu ramah dan tampil lebih rapi saat wisatawan datang untuk melihat-lihat mereka memasak, diajak berfoto bersama, bahkan kadang diajak bercakaa-cakap wisatawan.

Perubahan status menjadi desa wisata juga tetap saja menjadikan wanita sebagai obyek pembangunan sedangkan laki-laki tetap sebagai subyek pembanagunan. Jika dilihat dari kacamata gender kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan (unequal) posisi dan peran laki-laki dan wanita. Ketidakadilan yang memang sebelumnya sudah ada menjadi semakin tidak adil ketika akses wanita dalam pengambilan keputusan terbatas. Meski jumlahnya lebih banyak wanita di desa Baha tidak mempunyai suara yang seimbang dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

6.2. Saran

- Penetapan desa wisata hendaknya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam penentuan konsep desa wisata yang mereka inginkan (buttop up design)
- Proporsi wanita dalam proses pengambilan keputusan ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas
- Perlunya pelatihan kesadaran peran publik perempuan khususnya dalam pengembangan kegiatan wisata/desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia
- Daulay, Harmona, 2001, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran*, Jakarta: Galang Press.
- Dwipayana, AAGN Ari, 2001, *Kelas dan Kasta : Pergulatan Kelas Menengah Bali*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Engel, James F (et all), 1994, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Bina Aksara Rupa
- Fakih, Masour, 1997, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mosse, Julia Cleves, 1996, *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar
- Stoner, James A.F dan Charles Wankel, 1986, *Manajemen*, Jakarta: Intermedia.

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK DINAS PARIWISATA**

1. Bagaimana proses perubahan status desa biasa menjadi desa wisata ? Bagaimana dengan Desa Baha Kecamatan mengwi ?
2. Apa saja syarat menjadi desa wisata ?
3. Bagaimana potensi desa Baha sebagai desa wisata ?
4. Apakah perubahan status desa baha menjadi desa wisata terkait dengan rencana pengembangan pariwisata di kabupaten badung secara umum ?
5. Apa target Dinas pariwisata Badung, berkaitan dengan perubahan status Desa Baha menjadi Desa Wisata
6. Dalam proses perubahan status Desa baha menjadi Desa Wisata, bagaimana keterlibatan masyarakat, khususnya wanita ? Apakah mereka juga dilibatkan ?
7. Apakah dalam proses pengambilan keputusan mengenai perubahan status desa mempertimbangkan dampaknya terhadap wanita di desa baha ?
8. Bagaimana minat wisatawan/pasar terhadap obyek desa wisata ?

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK KEPALA DESA/APARAT**

- Apakah potensi desa Baha sebagai desa Wisata ?
- Bagaimana peran wanita di Desa Baha dengan adanya perubahan status menjadi desa wisata ?

- Apakah selama ini perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa ? Bagaimana bentuk keterlibatan perempuan ?
- Apa saja peran wanita di desa ini ?
- Apa saja peran wanita dalam pengelolaan desa wisata ?
- Apa dampak perubahan desa wisata terhadap masyarakat secara umum ? Terhadap wanita ?
- Apakah wanita memiliki akses dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam hal mengembangkan ekonomi berkaitan dengan status desa baha sebagai Desa wisata ?
- Bagaimana pendapat bapak mengenai peran wanita di desa ini ?
- Bagaimana pendapat bapak mengenai dampak yang diperoleh wanita dari perubahan status desa Baha menjadi desa wisata ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WANITA

- Apakah menurut ibu ada pengaruh perubahan desa Baha menjadi desa wisata ? Bagaimana bentuk perubahannya ?
- Apa dampak perubahan status desa menjadi desa wisata bagi wanita ?
- Apa saja peran wanita di desa ini ?
Apakah selama ini wanita terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa ? Bagaimana bentuknya ?
- Ada keuntungan yang bisa diambil wanita berkaitan dengan masuknya wisatawan ke desa wisata ?
- Apa yang ibu lakukan untuk menangkap peluang ekonomi yang ada ?
- Apakah kedatangan wisatawan membawa dampak bagi kehidupan di desa ini ? Bagaimana tentang kehidupan wanita di desa ini ? apa bentuk perubahan yang terjadi ?

CURICULUM VITAE KETUA PENELITI

Nama : Dian Yulie R, S.Sos
NIP : 132 230 966
Pangkat/Gol : Penata Muda/III A
Jabatan sekarang : Asisten Ahli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Sosiologi
Penelitian : -- kali
Pengabdian : 1 kali
Publikasi : -- kali

CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI

1. Nama : Sri Endah Nurhidayati, S.Sos
2. Umur/J. Kelamin/Agama : 32 tahun/Perempuan/Islam
3. Alamat rumah : Tambak Wedi Baru VI/36 Surabaya
Tlp: 0818515399
4. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/III A/132 208 715
5. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
7. Alamat kantor : Gedung D3 Pariwisata Fisip Unair
Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya
Tlp: (031) 5036341

Pusat Penelitian/Studi Wanita Unair
Kampus C Jl. Mulyorejo Surabaya

8. Riwayat Pendidikan Tinggi :

No	Pendidikan	Tempat	Tahun		Bidang spesialis	Titel
			Dari	Sampai		
01	Sarjana	Fisip Unair Surabaya	1988	1993	Antropologi	S.Sos

9. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	S. Dana	Ket
01	1992	Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Wanita di Surabaya dan Pasuruan		Anggota
02	1992	Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Rumah Susun Surabaya		Anggota
03	1992	Diskriminasi Seksual Buruh Wanita Di Pabrik	Mandiri	Ketua
04	1998	Upaya Mewujudkan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Usaha Kecil di Jawa Timur	DPRD	Anggota

No	Tahun	Judul Penelitian	S. Dana	Ket
05	1998	Aktualisasi Program Peningkatan Peranan Wanita di Kabupaten Dati II Gresik	Bappeda Kab. Gresik	Anggota
06	1998	Aktualisasi Program Peningkatan Peranan Wanita di Kabupaten Dati II Mojokerto	Bappeda Kab. Mojokerto	Anggota
07	1999	Proyek Pengembangan Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial di Kabupaten Dati II Sidoarjo	Bappeda Kob. Sidoarjo	Anggota
08	1999	Penyusunan Review Profil P2W Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kotamadya Dati II Surabaya	Bappeda Kodya Surabaya	Anggota
09	1999	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bromo	Dinas Pariwisata Tk. I Jatim	Anggota
10	1999	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Wanita (Pendampingan Koperasi An-Nisa III Kencong-Jember)	Kanwil Koperasi Jatim	Anggota
11	1999	Studi Aplikasi Upaya Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Di Kabupaten Dati II Gresik	Bappeda Kab. Gresik	Anggota
12	2000	Review Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita Di Kabupaten Gresik	Bappeda Kab. Gresik	Anggota
13	2000	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita (P2W) di Kabupaten Mojokerto : Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya	Bappeda Kab. Mojokerto	Anggota
14	2000	Penanggulangan Pengangguran Dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2000	Bappeda Kab. Mojokerto	Anggota
15	2001	Pembersihan Pantai dan Penanaman Pohon Bakau di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	SIWU	Anggota
16	2001	Profil Pekerja Perempuan pada Sektor Perhotelan di Kotamadya Surabaya (Suatu analisis Gender)	DIK Suplemen	Ketua
17	2001	Pengembangan Dan Mekanisme Aliran Bahan Baku, Produksi Dan Pemasaran Usaha Ekonomi Bagi Perempuan Di Pedesaan Kabupaten Bangkalan	Meneg PP	Anggota

18	2001	Perspektif Gender Program Pemberdayaan Perempuan Lintas Sektor Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001	Bappeda Kab. Sidoarjo	Anggota
19	2001	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita : Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Mojokerto	Bappeda Kab. Mojokerto	Anggota
20	2001	Profil Kedudukan Dan Peranan Wanita Di Kota Mojokerto	Bappeda Kota Mojokerto	Anggota
21	2001	Studi Pemanfaatan Perempuan Dalam Bisnis Media	Meneg PP	Anggota
22	2001	Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Jawa Timur	Balitbangda Jatim	Anggota
23	2002	Studi Kelayakan Pengembangan Ecowisata Terpadu Kota Balikpapan	Kantor Pariwisata Kota Balikpapan	Anggota
24	2002	Pola Aktualisasi Wanita Dalam Proses Pengambilan keputusan Wisata Terkait Dengan Perubahan Status Desa Baha Menjadi desa Wisata	Ditjen Dikti	Anggota
25	2002	Analisa Perencanaan dan Pengembangan Mekanisme Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sidoarjo	Bappeda	Anggota
26	2002	Study Amdal Proyek Gas Ujungpangkah Gresik	Amerada-Hess	Anggota

Surabaya, 1 Nopember 2002

Sri Endah Nurhidryati, S.Sos
NIP : 132 208 715

PAMERAN

-1 NOV 2003